

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Okinawa (沖縄) merupakan salah satu prefektur atau propinsi di Jepang yang letaknya paling selatan. Kepulauan Okinawa terbentang antara Jepang dan Taiwan. Terdiri dari 41 pulau berpenghuni dan 16 pulau tidak berpenghuni, dengan luas wilayah yaitu 2.271,30 km² dan luas perairan sebesar 0,5% dari luas wilayah (*Wikipedia 2008*).

Kondisi alam Okinawa, sebagian besar terdiri dari batu koral, dan memiliki pantai yang terindah di Jepang. Dengan iklim subtropis yang hangat dan kondisi alam yang mengagumkan, Okinawa merupakan tempat yang paling tepat untuk dijadikan tempat pariwisata yang eksotis (*Wikipedia 2008*).

Dahulu, Okinawa dikenal dengan nama *Ryukyu* (琉球) yang berbentuk Kerajaan. Namun, pada masa *Toyotomi Hideyoshi* tahun 1609, Kerajaan Ryukyu ini ditaklukan oleh salah satu negara bagian Jepang yang paling kuat pada masa itu, yaitu negara bagian *Satsuma*. Pada masa restorasi Meiji, tahun 1879, negara Jepang dengan bentuk yang baru kemudian berusaha menjadikan Okinawa sebagai salah satu propinsi di Jepang. Kemudian, pasca Perang Dunia kedua, Kepulauan Okinawa menjadi daerah pendudukan Amerika, yang berlangsung sampai tahun 1972. Setelah masa pendudukan Amerika berakhir, Okinawa kemudian kembali menjadi salah satu propinsi di Jepang (*Kodansha Encyclopedia of Japan 1983: 86*)

Kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 merupakan kegembiraan bagi banyak pihak (*Sri Ayu Wulansari 1997: 11*), karena dengan bergabungnya Okinawa menjadi salah satu propinsi Jepang, maka masyarakat Okinawa berharap mempunyai hak asasi sebagai warga negara yang dapat menentukan nasib daerahnya sendiri (otonomi daerah). Namun, kenyataannya lain dengan harapan. Masyarakat Okinawa sedikit sekali mempunyai kesempatan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, dan otonomi daerah yang diharapkan tidak pernah terwujud sampai saat ini, karena kekuasaan Jepang absolut atau mutlak di

Okinawa untuk menentukan kehidupan masyarakatnya, terutama kehidupan politik dan ekonomi di Okinawa.

Setelah Okinawa masuk ke dalam provinsi di Jepang, kekuasaan Amerika Serikat masih tersisa di kepulauan Okinawa. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak terdapat basis militer Amerika Serikat yang menempati sekitar 11% wilayah kota Okinawa dan 20% wilayah kepulauan Okinawa (*Dian Mutia Amsar 2003: 46*), sehingga 75% dari keseluruhan basis militer yang ada di Jepang, berada di wilayah propinsi Okinawa (*Sri Ayu Wulansari 2008: 1*).

Fenomena ini terjadi karena Jepang dan Amerika Serikat, setelah penanda tanganan perjanjian perdamaian San Fransisco tahun 1951, mempunyai ikatan Perjanjian Kerjasama Keamanan Luar Negeri Jepang dengan Amerika Serikat (*Watanabe Akio 1970: 17*), yang mengharuskan Jepang untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dijadikan basis kekuatan militer Amerika Serikat, dan kepulauan Okinawa dipilih, karena dipandang sebagai wilayah paling strategis untuk mengawasi keamanan dunia pada saat dimulainya perang dingin sampai sekarang. Dalam hal ini, Okinawa tidak dianggap bagian integral dari Jepang, melainkan bagian terpisah atau “*minor island*” dan tersubordinasi oleh relasi kuasa antara Jepang dan Amerika Serikat (*Sri Ayu Wulansari 2008*)

Apabila dilihat dari isi perjanjian tersebut, maka Okinawa mengalami *dual relationship* antara Jepang dan Amerika Serikat. Akibat dari *dual relationship* ini, secara struktural, posisi Okinawa masuk ke dalam struktur *triangle* atau segitiga, dalam arti Okinawa masuk ke dalam struktur Jepang dan Amerika, dan Jepang sendiri pun masuk ke dalam struktur Amerika (*Hook and Siddle 2003: 3*). Struktur inilah yang kemudian membuat suatu struktur ekonomi dependensi (*経済的な依存関係の構造*) antara Okinawa dan Jepang, serta mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi Okinawa menjadi dikontrol dan didominasi oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang berpihak pada eksistensi basis militer Amerika Serikat.

Menurut Hook dan Siddle (2003), Struktur ekonomi dependensi yang terjadi di Okinawa, yaitu antara Okinawa dan Jepang adalah suatu struktur yang membuat ekonomi Okinawa tergantung kepada pendapatan dari basis-basis militer Amerika (*米軍基地関係収入*) di satu sisi, dan di sisi lain, propinsi Okinawa juga

tidak bisa lepas dari subsidi dan investasi pemerintah pusat Jepang (補助金・政府支出) dalam hal proyek pekerjaan umum (konstruksi), dan industri turisme (hlm. 3-8). Tiga pendapatan utama yang mempengaruhi perekonomian Okinawa ini lazim disebut 3K yaitu *Kichi* (基地 ;basis militer), *Koukyou kouji* (公共事業 ;proyek pekerjaan umum), dan *Kankou* (観光 ;industri turisme) (Sri Ayu Wulansari 2008: 3).

Kehadiran basis militer Amerika Serikat (米軍基地) memang turut andil dalam perekonomian Okinawa, namun pada kenyataannya, lebih banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh kehadirannya, selain itu kehadiran basis militer AS pun kini hanya menyumbang 5% untuk perekonomian lokal dari 15% pada tahun 1972 (“Okinawa”).

Dahulu, Okinawa mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani, namun, dengan dibangunnya basis militer telah menghilangkan lahan pertanian sumber mata pencaharian utama. Hal ini berdampak pada penurunan produksi pertanian. Kemudian untuk pembangunan industri, basis militer juga telah merusak tata ruang kota, yang mengakibatkan rencana pembangunan kawasan urban maupun perkembangan industri menjadi sulit. Padahal dengan adanya sarana industri yang baik, kegiatan produksi pun akan dapat meningkat, dan dengan demikian sedikit demi sedikit dapat tercipta kehidupan ekonomi Okinawa yang independen dan berkesinambungan (Dian Mutia Amsar 2003: 46).

Bagaimanapun masyarakat Okinawa tidak mau menerima kehadiran basis militer Amerika, namun bagi mereka, kehadiran basis militer Amerika Serikat¹ sudah tidak bisa dihindari lagi, karena apabila masyarakat Okinawa tidak mau menerima kehadiran basis militer tersebut, maka pemerintah pusat mengancam akan mencabut subsidi, termasuk investasi dalam bidang industri turisme (観光産業) yang saat ini telah berkembang pesat dan menjadi pengharapan bagi perekonomian propinsi. Selain itu, pendapatan sebagian masyarakat Okinawa dari basis militer AS juga akan hilang, karena basis militer tersebut ternyata juga dibiayai oleh pemerintah Jepang. Biaya sewa tanah (軍用地料) untuk basis

¹Basis militer Amerika Serikat (米軍基地) yang ada di Jepang, sebagian besar atau sekitar 75% berada di wilayah Okinawa. Dan hal ini dirasakan tidak adil oleh masyarakat Okinawa (Sri Ayu Wulansari 2008: 1).

militer AS (米軍基地) dan gaji para pekerja Jepang (軍雇用者所得), termasuk pekerja lokal Okinawa, di basis militer AS tersebut 70% adalah tanggung jawab Jepang (“Okinawa”), sehingga pendapatan masyarakat Okinawa yang bergantung pada eksistensi basis militer AS juga berasal dari dana pemerintah Jepang. Oleh karena itu, masyarakat Okinawa juga tidak dapat berbuat banyak akan kondisinya saat ini, mengingat Okinawa tidak mempunyai sumber ekonomi yang stabil dan memadai, serta hanya bisa mengandalkan subsidi dan investasi dari pemerintah pusat. Apabila subsidi dari pemerintah pusat dicabut, maka kesempatan kerja di Okinawa akan semakin berkurang, dan dapat berkembang menjadi masalah pengangguran (失業率) yang semakin bertambah di kemudian hari.

Dengan hanya mengandalkan subsidi dan investasi dari pemerintah pusat Jepang, Okinawa menjadi prefektur yang termiskin diantara prefektur lainnya di Jepang. Dari data yang dikeluarkan oleh *Department of National Accounts, Economic and Social Research Institute Japan* (内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部) pada tahun 2004, Okinawa berada di urutan terendah dalam hal pendapatan prefektur per kapita (一人当たり県民所得). Dibanding dengan urutan tertinggi, yaitu Tokyo yang mencapai 52.772 dolar/tahun, Okinawa hanya mencapai 23.000 dolar/tahun (*Statistics Bureau Japan: Japan Statistical Yearbook 2008*). Selain itu, pendapatan penduduk di prefektur Okinawa hanya 72% dari angka rata-rata pendapatan penduduk di prefektur lainnya di Jepang. Rata-rata tingkat pengangguran (平均失業率) di Okinawa juga paling tinggi di Jepang, yaitu sekitar 7,4% (*Labour Force Survey, Official Website Okinawa Prefecture 2009*) dari total jumlah penduduk Okinawa sebesar 1,37 juta jiwa pada tahun 2008 (*Okinawa Statistics Division 2009*) Angka ini kira-kira hampir 2 kali lebih banyak dari pada angka rata-rata di Jepang. Tingkat pengangguran yang paling tinggi dialami oleh kalangan muda yang berumur sekitar 15-24 tahun.

Mata pencaharian para penduduk di Okinawa saat ini, sebagian besar mengandalkan pariwisata (観光) sebagai mata pencaharian mereka. Selain itu,

para penduduk juga ada yang berprofesi sebagai petani² (農民), nelayan (漁師), dan bekerja di basis-basis militer³ Amerika Serikat (軍雇用者所得) yang ada di Okinawa. Kemudian, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan prefektur⁴ (公務員) atau bekerja di sektor industri servis atau jasa (サービス業), perdagangan dan manufaktur (卸売・小売業・製造業), serta proyek pekerjaan umum (公共工事) yang disubsidi oleh pemerintah pusat Jepang.

Bagi para penduduk Okinawa, pekerjaan di basis militer lebih menjanjikan dan lebih besar upahnya daripada pekerjaan lainnya. Menurut Ota Masahide⁵, terdapat 40.000 masyarakat Jepang yang bekerja di basis militer pada awal-awal tahun 1972, namun pada 3 dekade setelah tahun 1972, jumlahnya berkurang menjadi 8.000 orang (Ota 2000: 271), dan kemungkinan akan terus berkurang. Walaupun begitu, masyarakat Okinawa yang mengharapkan pekerjaan di basis militer masih cukup banyak, dan begitu juga sebaliknya, banyak juga masyarakat Okinawa yang menentang eksistensi basis militer AS tersebut. Alasan dari mereka yang berharap dapat bekerja di basis militer AS adalah karena basis militer Amerika menawarkan gaji yang tinggi dan kondisi pekerjaan yang bagus bagi para pegawainya, namun dengan persyaratan harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, banyak sekolah di Okinawa yang menawarkan pendidikan dan kursus bahasa Inggris. Disebutkan bahwa, gaji rata-rata per bulan di basis militer adalah 311.000 yen (3600 dolar) untuk pekerja sampai dia pensiun, yaitu ketika dia berumur rata-rata 40,8 tahun dengan karir rata-rata sepanjang 12,9 tahun (Kyodo News International 2002)⁶. Tetapi, akhirnya ini pekerjaan di basis militer Amerika Serikat juga semakin berkurang,

²Petani di Okinawa bukan berarti petani yang menanam padi atau gandum, namun merupakan petani yang menanam hasil perkebunan (sebagian besar berupa buah-buahan tropis), seperti nanas, pisang, pepaya, jambu, mangga, dan gula tebu.

³Basis militer Amerika Serikat, sebagian besar terkonsentrasi di bagian tengah dan selatan pulau Okinawa dan membuka cukup banyak kesempatan kerja bagi penduduk lokal Okinawa (Dian Mutia Amsar 2003: 46).

⁴Pemerintahan prefektur Okinawa berada di tingkat teratas dalam hal membuka lapangan pekerjaan, dibanding basis militer Amerika Serikat (Kyodo News International, Inc., BNET Management, findarticles.com, 1 April 2002).

⁵Ota Masahide pernah menjadi Gubernur Okinawa dari tahun 1990 sampai tahun 1998 atau 2 kali masa jabatan (Wikipedia 2008)

⁶Artikel dari internet. Sumber: Kyodo News International, Inc., BNET Management, findarticles.com, 1 April 2002.

padahal prefektur harus menyediakan sekitar 9000 buah lapangan pekerjaan untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak semakin bertambah tinggi (*Negishi 2002*)⁷.

Menurut Yoshikawa⁸, sebenarnya, wilayah Okinawa sangatlah strategis untuk bisa melakukan perdagangan internasional, terutama dengan Cina dan Taiwan, yang secara geografis dekat dengan perbatasan Okinawa di pulau Yonakuni (1-2), sehingga kemungkinan rencana untuk dibuatnya zona ekonomi perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) untuk mengembangkan perekonomian Okinawa dapat terwujud. Namun oleh campur tangan pemerintah pusat Tokyo dan kebijakan politiknya yang mengutamakan hubungan kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat, rencana untuk mengembangkan perekonomian Okinawa dengan membuat *Free Trade Zone* ini terus dihalangi (*Sri Ayu Wulansari 2008: 21*).

Oleh karena ketatnya peraturan dan batasan untuk berinvestasi di Okinawa, maka hanya sedikit perusahaan Jepang, Taiwan, dan Korea yang ingin membuka usaha bisnisnya di Okinawa. Selain itu, banyak perusahaan asing dan lokal yang mempunyai investasi di Okinawa merugi, karena jumlah penduduk atau konsumen sangat terbatas, *skill* atau kemampuan penduduk Okinawa yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibuka⁹, adanya persaingan dari produk perusahaan nasional Jepang dan adanya intervensi pemerintah pusat Jepang yang mendominasi kebijakan perekonomian Okinawa (*Negishi 2002*). Dapat dikatakan bahwa, kegagalan *Free Trade Zone* di Okinawa, salah satunya disebabkan karena pemerintah pusat tidak ingin perekonomian Okinawa menjadi mandiri. Kemudian, dengan menekankan industri turisme dan proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan perekonomian Okinawa, maka strategi pemerintah Jepang untuk membuat Okinawa tetap dapat menerima kehadiran basis militer Amerika bisa terlaksana (*Sri Ayu Wulansari 2008: 3*).

⁷Artikel dari internet. Sumber dari *The Japan Times Online* (search.japantimes.co.jp), 14 September 2002.

⁸Hiroya Yoshikawa adalah seorang pengajar dari Okinawa University.

⁹Seperti contoh kasus lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan *Multimedia Building* di Nago City. Mereka memerlukan pekerja yang langsung siap bekerja dengan *skill* yang bervariasi, dan memerlukan training yang seminimum mungkin, namun sebagian besar para pencari kerja (masyarakat Okinawa) menginginkan pekerjaan dengan posisi asisiten administrasi, sehingga terjadi gap (jurang) antara *skill* yang diperlukan perusahaan dan *skill* yang dimiliki oleh para pencari kerja (*Negishi 2002*).

Okinawa adalah korban dari struktur subordinat dari dominasi pemerintahan pusat Jepang selama hampir 36 tahun sejak bergabungnya kembali Okinawa ke Jepang pada tahun 1972. Demi sebuah Perjanjian Kerjasama Keamanan Luar Negeri Jepang dengan Amerika Serikat¹⁰, sebagai salah satu propinsi di Jepang, Okinawa bagai dianaktirikan dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Jepang. Kondisi ini mengakibatkan posisi Okinawa menjadi inferior di bidang politik, ekonomi, dan budaya baik di sistem global (dunia), regional (Asia), dan nasional (Jepang), serta secara jelas, struktur tersebut menekan kesempatan hidup, pilihan ekonomi¹¹, dan kualitas hidup masyarakat Okinawa sampai saat ini (*Sri Ayu Wulansari 2008: 4*).

Kondisi Okinawa saat ini, secara struktural, didominasi oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang mendukung eksistensi basis militer Amerika Serikat. Dominasi ini kemudian membuat suatu struktur yaitu Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang. Struktur ini membuat perekonomian Okinawa menjadi tergantung kepada subsidi dari Jepang dan pendapatan dari basis militer Amerika Serikat, dimana 70%nya merupakan tanggung jawab pemerintah Jepang ("*Okinawa*"). Hal ini membuat perekonomian Okinawa menjadi tidak berkembang, dan pada akhirnya berimbas juga pada tingkat pengangguran di Okinawa yang semakin tinggi.

1. 2. Perumusan Masalah

Berpijak dari kondisi Okinawa, salah satu propinsi di Jepang yang mengalami ketergantungan ekonomi terhadap subsidi dari pemerintah pusat Jepang dan pendapatan dari basis militer Amerika Serikat, maka skripsi ini bermaksud menjelaskan tentang tingginya tingkat pengangguran di Okinawa sebagai dampak dari Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang.

¹⁰Bagi Jepang, perjanjian keamanan dunia dengan Amerika Serikat ini cukup menguntungkan, karena militer Amerika Serikat juga turut serta menjaga keamanan Jepang, sehingga pemerintah Jepang tidak perlu repot, khususnya dalam hal dana, untuk mengurus militernya sendiri

¹¹Pilihan ekonomi disini diibaratkan sebagai pilihan mata pencaharian penduduk Okinawa.

1. 3. Kerangka Teori

Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang adalah suatu struktur yang merupakan hasil dari dominasi kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang mendukung eksistensi basis militer Amerika Serikat di Okinawa. Hal ini mempengaruhi perekonomian Okinawa menjadi stagnan, tidak berkembang, dan tergantung kepada subsidi dari pemerintah Jepang dalam hal proyek konstruksi umum dan industri pariwisata, serta 70% pendapatan dari basis militer Amerika Serikat di Okinawa. Perekonomian yang stagnan, tidak berkembang, dan tidak mandiri ini membuat suatu dampak yang cukup besar terhadap tingkat pengangguran di Okinawa yang semakin tinggi.

Struktur ekonomi ketergantungan yang eksis di Okinawa saat ini ternyata bisa dianalisis dengan Teori Dependensi (Ketergantungan). Teori Dependensi muncul pertama kali pada tahun 1960-an di Amerika Latin dalam posisi yang berlawanan dengan Teori Modernisasi. Jika Teori Modernisasi menganalisa permasalahan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga dari sudut pandang Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, maka Teori Dependensi melihat persoalan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga dari sudut negara-negara Dunia Ketiga itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Dependensi mewakili “suara negara-negara terbelakang” untuk menentang hegemoni ekonomi, politik, sosial-budaya dan intelektual dari negara-negara maju.

Teori Dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga yang miskin akibat sumber daya ekonominya didominasi oleh negara-negara maju. Sebagai hasilnya, negara miskin ini menjadi terbelakang, miskin, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil (*Wikipedia 2009; Sociology Dictionary 1991*)

Sebagai ilmuwan pertama yang bertanggung jawab terhadap penyebaran teori ini pada masyarakat intelektual internasional adalah Andre Gunder Frank, yang kebetulan berada di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Frank kemudian memunculkan pandangannya mengenai konsep keterbelakangan (*underdevelopment*) dan model eksploitasi satelit-metropolisnya (*Frank 1967*). Selain Frank, Theotonio Dos Santos juga memunculkan perspektif dependensinya dalam menganalisa ekspansi dan dominasi kekuatan imperialis di negara-negara

Dunia Ketiga serta struktur hubungan antara negara dominan (*dominant countries*) dan negara tergantung (*dependent countries*) (Santos 1973). Samir Amin di sisi lain, adalah ilmuwan yang melahirkan Teori Peralihan Kapitalisme Pinggiran, yang memberi penekanan pada suatu kecenderungan bahwa semua negara pinggiran akan mengalami model pembangunan yang sama (Samir Amin 1976).

Diantara berbagai perspektif teori dependensi di atas, perspektif yang akan digunakan untuk menganalisa kondisi ketergantungan di Okinawa adalah perspektif teori dependensi dari Theotonio Dos Santos. Santos mengasumsikan bahwa dependensi diibaratkan seperti hubungan antara negara maju yang dominan dan negara miskin yang tersubordinasi dalam suatu sistem ekonomi dunia. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung kepada negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “Pusat - Periferi” (Widodo 2008).

[Dependency is]...an historical condition which shapes a certain structure of the world economy such that it favors some countries to the detriment of others and limits the development possibilities of the subordinate economics...a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development and expansion of another economy, to which their own is subjected.

(Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence," in K.T. Fann and Donald C. Hodges, eds., Readings in U.S. Imperialism. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226)¹²

Terjemahan:

[Ketergantungan adalah]... sebuah kondisi historis yang membentuk sebuah struktur ekonomi dunia dimana beberapa negara mempunyai suatu kepentingan yang merugikan negara lainnya, sehingga membuat

¹²Artikel dari internet. Sumber: Vincent Ferraro. Juli 1996. www.mtholyoke.edu/acad/intrel/depend.htm

kemungkinan pembangunan di negara yang dirugikan tersebut menjadi terbatas di dalam kondisi subordinasi ekonomi... yaitu kondisi dimana perekonomian dari suatu grup negara telah diekspansi oleh perekonomian negara lainnya, atau kondisi perekonomian mereka telah tersubjektifikasi oleh perekonomian negara lainnya.

Berpijak pada asumsi-asumsi dasar tersebut di atas, Teori Dependensi menghasilkan berbagai implikasi kebijaksanaan pembangunan yang perlu diikuti oleh negara-negara Dunia Ketiga untuk membangun ekonominya yang secara mendasar bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan pembangunan Teori Modernisasi, yaitu :

1. Mengurangi, bahkan jika dimungkinkan, menghilangkan keterkaitan dengan negara-negara maju di Barat, karena semakin erat keterkaitan dengan negara-negara sentral tersebut, semakin buruk situasi ketergantungan dan keterbelakangan negara-negara pinggiran.
2. Sebagai pengganti dari ketergantungan terhadap bantuan modal asing dan teknologi, negara-negara pinggiran seharusnya mengembangkan model pembangunan yang berdikari (*self-reliance model*) untuk melaksanakan dan mencapai pembangunan yang otonom dan bebas dari situasi ketergantungan. Ini tidak berarti bahwa negara-negara pinggiran harus mengisolasi diri tetapi negara-negara pinggiran tidak boleh didominasi oleh negara-negara sentral.
3. Pembangunan memerlukan perubahan struktur ekonomi, politik dan sosial secara total dan menyeluruh, sehingga revolusi sosialis mungkin tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan.

Melihat perspektif Teori Dependensi ini, bisa dilihat persamaan kondisi antara Okinawa dan Negara Dunia Ketiga, yaitu sebagai negara periferi yang didominasi oleh negara pusatnya, namun karena Okinawa bukanlah suatu negara, melainkan salah satu propinsi di Jepang, maka bisa diibaratkan bahwa Okinawa merupakan propinsi periferi, dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Jepang, yang didominasi oleh kebijakan politik ekonomi negara pusatnya, yaitu Jepang, "bekerja sama" dengan Amerika Serikat, yang mempunyai kepentingan

terhadap Jepang. Dominasi ini kemudian membuat suatu struktur ekonomi dependensi antara Okinawa dan Jepang.

Sebagai propinsi periferi, kondisi perekonomian dan pembangunan di Okinawa paling terbelakang se-Jepang, dan bahkan dinobatkan sebagai propinsi termiskin di Jepang¹³ serta propinsi yang paling tinggi tingkat penganggurannya, karena pembangunan perekonomian dan industri di Okinawa terhambat akibat dominasi kebijakan politik ekonomi dari negara pusatnya, yaitu Jepang. Walaupun merasa dieksploitasi oleh Jepang, Okinawa tetap tidak bisa melepaskan diri dari Jepang, karena sebenarnya Okinawa juga belum memiliki sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk mandiri, sehingga ketergantungan Okinawa terhadap Jepang, sebagai negara pusatnya, tidak dapat dihindari.

1.4 Tujuan Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa, yang dikaji melalui perspektif Teori Dependensi. Bila kita melihat teori dependensi ini, kondisi Okinawa yang merupakan salah satu propinsi di Jepang, mirip dengan kondisi Negara Dunia Ketiga yang dianggap sebagai Negara Periferi yang didominasi oleh kebijakan Negara Pusatnya, sehingga membuat kondisi Negara Periferi tersebut menjadi terbelakang. Sedangkan dalam kasus Okinawa, sebagai Propinsi Periferi, Okinawa didominasi oleh kebijakan politik ekonomi Negara Pusatnya, yaitu Jepang. Dominasi ini kemudian membuat suatu Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang, sehingga membuat perekonomian dan pembangunan di Okinawa menjadi terbelakang dibandingkan propinsi lainnya di Jepang, serta berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Okinawa.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu bab pendahuluan, bab isi yang akan diuraikan dalam dua bab, dan bab penutup.

¹³*Pendapatan per kapita propinsi Okinawa hanya sekitar 23.000 dolar/tahun, dibandingkan pendapatan per kapita tertinggi, yaitu Tokyo yang mencapai 52.772 dolar/tahun (Statistics Bureau Japan: Japan Statistical Yearbook 2008)*

Pada Bab 1 diuraikan latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penulisan, penguraian sistematika penulisan, dan metode penelitian.

Bab 2 berisi penjelasan tentang Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang, yang membuat perekonomian Okinawa menjadi tergantung kepada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Jepang dan pendapatan dari basis militer Amerika Serikat di Okinawa.

Bab 3 berisi penjelasan tentang masalah tingginya tingkat pengangguran di Okinawa sebagai dampak dari Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang, yang dianalisis melalui Teori Dependensi.

Terakhir, pada Bab 4 dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan. Bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan FISIP UI, artikel dari internet (*Official Website Okinawa Prefecture; Statistics Bureau Japan*), Bapak dan Ibu dosen, terutama Ibu Sri Ayu Wulansari atau Wulan Sensei yang telah banyak membantu dalam hal data mengenai Struktur Ekonomi Dependensi di Okinawa.